

**STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN  
PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL  
(Studi Empiris pada Sektor Keuangan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Oleh :

Yulanda Nurfauzi, Arif Lukman Santoso  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

**ABSTRACT**

*The objective of this research is to examine the level of intellectual capital disclosure in annual report issued by the financial sector on Indonesia Stock Exchange (IDX). This research examine the influence of corporate governance structure (board composition, size of audit committee and frequency of audit committee meetings) as independent variables, on the disclosure of intellectual capital as the dependent variable. This research used 153 annual reports of listed companies on the Stock Exchange from 2008 to 2011. Sample in this research was selected by using purposive sampling method. Content analysis is used to analyses the company's annual report. Multiple regression model and statistic descriptive is use to analysis data. The results of this study suggest that the size of the board of commissioner, the size of the audit committee and the number of audit committee meetings have significant effect on the disclosures of intellectual capital.*

**Keyword:** *Corporate Governance Structure, Intellectual Capital Disclosure*

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini perekonomian dunia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, persaingan yang ketat, pertumbuhan inovasi yang luar biasa yang mengakibatkan setiap perusahaan harus mengubah cara bisnisnya. Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat memaksa perusahaan-perusahaan mengubah basis bisnis mereka, dari *labor based business* menjadi *knowledge based business* (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Pada sektor jasa perubahan tersebut bersifat mendesak dikarenakan modal utama yang dimiliki berbasis pada pengetahuan (sumber daya manusia) dan teknologi yang mendukung struktur perusahaan serta pelayanan pelanggan.

Selama beberapa dekade ini, telah terjadi sebuah realisasi pertumbuhan secara cepat yang menyadari arti *penting* dari *intangible assets* dan *intellectual capital* sebagai bagian dari operasi perusahaan (Pike, Rylander, dan Roos dalam Permatasari 2010). *Intellectual capital* merupakan kepemilikan pengetahuan dan

pengalaman, pengetahuan dan keterampilan profesional, hubungan yang baik kapasitas teknologi yang diaplikasikan serta akan memberikan keunggulan keuntungan kompetitif pada perusahaan (CIMA, 2001). Perhatian terhadap *intellectual capital* telah meningkat seiring meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya nilai dan kemakmuran perusahaan yang tidak hanya dipengaruhi oleh *financial and physical capital* melainkan juga *human and hidden capital*. *Intellectual capital* ditempatkan sebagai faktor kunci dalam konteks kinerja atau kemajuan suatu organisasi (Rupidara, 2008). Menurut Bukh (2005) *intellectual capital* didefinisikan sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses, atau teknologi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Price Waterhouse Coopers mengidentifikasi bahwa *intellectual capital disclosure* merupakan strategi penting bagi perusahaan. Tipe informasi yang paling banyak dipertimbangkan oleh investor pada kenyataannya tidak diungkapkan oleh manajer dalam laporan keuangan. Hal ini yang kemudian menimbulkan terjadinya kesenjangan informasi atau *information gap* antara investor dengan pihak manajemen (Bozzolan, Favotto, dan Ricceri, 2003). Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital disclosure* penting untuk diungkapkan oleh perusahaan mengingat permintaan *stakeholders* juga tinggi.

*Corporate governance* merupakan topik yang telah mulai mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal di Indonesia. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan. Perusahaan yang dikelola dengan baik (*good corporate governance*) mempunyai ciri diantaranya menyampaikan informasi dengan lebih cepat, akurat dan lengkap. Suatu informasi dianggap informatif jika informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan (*beliefs*) para pengambil keputusan. Adanya suatu informasi yang baru akan membentuk suatu kepercayaan yang baru dikalangan para investor. Kepercayaan baru ini akan mengubah harga melalui perubahan *demand* dan *supply* surat-surat berharga. Penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan mampu meningkatkan harga saham perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian mengenai praktik *intellectual capital disclosure* dalam *annual report* perusahaan publik menarik dilakukan dalam konteks Indonesia (Purnomosidhi, 2006). Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang menetapkan item-item apa saja yang termasuk dalam aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat dikelola, diukur dan dilaporkan, baik dilaporkannya *mandatory disclosure* maupun *voluntary disclosure*. Kedua untuk mencari informasi yang lebih rinci tentang pengelolaan *intellectual capital* mulai dari pengikhtisaran, pengukuran sampai pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan. Ketiga, dunia bisnis di Indonesia kurang memiliki keunggulan

kompetitif yang menyebabkan rendahnya daya saing dan kurangnya kemampuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan (*going concern*).

Penelitian ini memilih konteks di Indonesia karena adanya undang-undang yang mengatur tentang struktur dan organisasi perseroan terbatas maupun tata kelola perusahaan *dalam* UU No.40 tahun 2007. Selain itu adanya peraturan Bapepam Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang diantaranya menguraikan secara singkat mengenai penerapan tata kelola yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, maka akan lebih banyak memberikan informasi dan dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi. Selain itu, wacana yang sering dihadapi mengenai *intellectual capital* yaitu bagaimana cara pengukuran dan penyajian dari *intellectual capital*. Di Indonesia terdapat regulasi yaitu PSAK No.19 (revisi 2009) yang mengatur aset tidak berwujud. Menurut PSAK No.19 (revisi 2009) aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item *intellectual capital* apa saja yang perlu diungkapkan.

Sektor perusahaan keuangan dianggap sebagai objek ideal dalam penelitian ini. Perusahaan sektor keuangan lebih banyak menggunakan sumber daya intelektualnya dibandingkan sektor perusahaan lainnya. Keberhasilan perusahaan keuangan dalam memberi jasa atau layanan keuangan kepada pelanggannya sangat bergantung pada kecerdasan intelektual sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kegiatan bisnis dalam perusahaan keuangan yang mengelola dana dalam jumlah besar akan dapat menimbulkan potensi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kasus yang menimpa *senior relation manager* Citi Bank pada tahun 2011 terbukti membobol rekening nasabahnya hingga Rp. 17M. Kemudian perusahaan keuangan merupakan perusahaan yang berbasis pengetahuan dan menggunakan teknologi ternyata rawan tindakan kecurangan, contohnya seperti kasus pembobolan situs *website* Bank Central Asia dan Bank Lippo pada tahun 2000. Menurut Fitriani (2010) kasus tersebut merupakan kegagalan pengendalian resiko dalam penggunaan teknologi informasi yang diterapkan di perusahaan.

## **Telaah Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis**

### ***Intellectual Capital Disclosure (ICD)***

Munculnya “*new economy*”, yang secara prinsip didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga memicu tumbuhnya *interest* dalam *intellectual capital* (Guthrie *et al.*, 2000; Bontis, 1998). Salah satu area yang menarik perhatian baik akademisi maupun praktisi adalah yang terkait dengan kegunaan *intellectual capital* sebagai salah satu instrumen untuk menentukan nilai perusahaan (Stewart; Edvinsson dan Malone, 1997 dalam Permatasari, 2010). Menurut Saleh *et al.*, (2008), sampai saat ini tidak ada definisi IC yang berterima umum atau *universal*. Salah satu definisi paling menyeluruh dari IC ditawarkan oleh *The Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) dalam Li *et al.*, (2008):

“*possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organization competitive advantage*”

Pengungkapan informasi mengenai *intellectual capital* perusahaan masih bersifat *voluntary*. Sampai saat ini belum ada pengelompokan komponen *intellectual capital* yang diterima bersama dan belum ada pola khusus dalam pengungkapan *intellectual capital*. *Human capital* merupakan *lifeblood* dalam *intellectual capital* (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Komponen ini mencakup kompetensi dan pengetahuan individu yang ditunjukkan oleh karyawan perusahaan. Beberapa karakteristik yang dapat dimasukkan dalam *human capital* antara lain: pendidikan, kompetensi, pengetahuan, perekrutan, pelatihan yang berhubungan dengan karyawan dan lain - lain. *Structural capital* merupakan keseluruhan sumber daya non-humanis berbasis pada pengetahuan yang mendukung proses rutinitas kinerja bisnis dalam organisasi, mencakup *intellectual property* (hak cipta, paten dan *trademark*), filosofi manajemen, budaya perusahaan, sistem informasi, sistem jaringan, teknologi, pengembangan penelitian, dan lain-lain. *Relational capital* merupakan pengetahuan yang melekat pada jaringan pemasok maupun hubungan *customer* demi kelancaran jalannya usaha (berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan), antara lain: loyalitas konsumen, jaringan distribusi, kolaborasi bisnis, kontrak pejanjian, dan lain-lain. Berkembangnya wacana mengenai *intellectual capital* tidak lepas dari teori-teori riset sebagai landasan pengembangan penelitian.

### ***Stakeholder theory***

Teori ini mengemukakan bahwa manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan aktivitas yang diharapkan oleh *stakeholder* karena *stakeholder* berhak mengetahui atas informasi aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Menurut Purnomosidhi (2006), pelaporan aktivitas perusahaan tidak terbatas hanya pada pelaporan kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga pelaporan atas *intellectual capital* dan informasi lainnya di luar *mandatory disclosure* juga penting dilakukan.

### ***Legitimacy theory***

Menurut Guthrie *et al.*, (2004) teori legitimasi erat dihubungkan dengan teori *stakeholder*. Teori ini mengemukakan bahwa tanggung jawab *perusahaan* tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. *Legitimacy theory* berhubungan erat dengan *intellectual capital disclosure* (Guthrie *et al.*, 2004). Hal ini berkaitan dengan *strategic positioning* perusahaan. Perusahaan lebih mungkin untuk melaporkan tentang *intellectual capital*-nya jika mereka memiliki kebutuhan secara rinci untuk melakukan ini, jika mereka tidak dapat melegitimasi status mereka hanya melalui “*hard asset*” yang diakui sebagai simbol kesuksesan perusahaan tradisional (Guthrie *et al.*, 2004).

### ***Agency theory***

Berdasar *agency theory*, pemisahan kepemilikan antar elemen dalam perusahaan sangat rawan terjadinya *agency conflict* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Permatasari, 2010) dimana pihak *agent* (manajemen) cenderung memiliki motivasi dan keinginan yang berbeda dengan pihak *principal* (pemilik dana). Hubungan *agency* ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melaksanakan itu, *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* tersebut untuk membuat keputusan (*decision making*) (Anthony dan Govindarajan, 2005).

### ***Corporate Governance (CG)***

*Corporate governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Definisi mengenai *corporate governance* sangatlah beragam. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001:1) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

*“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”*

Definisi lain diungkapkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2000) yang melihat *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain. Wardhani (2006) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Dari beberapa definisi mengenai *corporate governance* merupakan suatu struktur (sistem atau mekanisme) yang baik untuk mengendalikan dan mengelola suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan dan masyarakat luas (Agustina, 2011).

### **Penelitian Terdahulu Dan Pembentukan Hipotesis Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Intellectual Capital Disclosure***

Dewan komisaris merupakan suatu bentuk mekanisme pengendalian internal dalam pengambilan keputusan untuk memastikan perilaku dari manajemen konsisten dengan keinginan pemilik perusahaan. Komisaris independen berarti anggota dari dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan, mereka semakin berperan dalam mempengaruhi pengungkapan lebih luas dalam rangka penciptaan nilai yang relevan dari *intellectual capital* bagi *stakeholder*. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Komisaris independen adalah individu yang secara khas dengan reputasi keahlian dan profesional yang relevan untuk bertahan, tanpa adanya peran manajemen atau hubungan dengan perusahaan (Li *et al.*, 2008). Komisaris yang independen diharapkan akan lebih mampu melakukan mekanisme pengawasan yang lebih baik, karena tidak adanya campur tangan kepentingan manajemen perusahaan. Akhirnya akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nasir dan Abdullah (2004) menemukan adanya hubungan yang positif signifikan antara komisaris independen dengan pengungkapan. Fakta empiris menemukan bahwa komisaris independen berhubungan secara positif dengan pengungkapan struktur internal/*internal capital* (Cerbioni dan Parbonetti, 2007). Li *et al.*, (2008) juga menemukan hubungan positif signifikan antara komisaris independen dengan *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Intellectual Capital Disclosure***

Menurut Prabowo (2010) komite audit merupakan komite operasional dewan yang memiliki tanggung jawab atas fungsi pengawasan dari pelaporan dan pengungkapan keuangan. Komite audit yang efektif harus meningkatkan pengendalian internal dan bertindak untuk mengurangi *agency cost* (Ho dan Wong, 2001) dan sebagai alat pengendalian yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual yang memiliki nilai bagi perusahaan. Munculnya komite audit dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang lebih terpercaya, peningkatan kualitas dan pengungkapan (Ho dan Wong, 2001).

Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit dapat menjadi suatu mekanisme pengawasan yang memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan (pemegang saham dan pemegang saham potensial) dan manajer, terutama dalam lingkungan pelaporan keuangan dimana mempunyai tingkat informasi yang berlainan. Penelitian yang telah dilakukan Ho dan Wong (2001) menghasilkan kesimpulan hubungan positif antara keberadaan komite audit dan praktik pengungkapan perusahaan. Li *et al.*, (2008) menyatakan bahwa perusahaan

dengan ukuran komite audit yang lebih besar cenderung menyediakan pengungkapan *intellectual capital* lebih besar di dalam laporan tahunannya. Jadi, diharapkan komite audit yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik pengungkapan *intellectual capital*. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

### **Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap *Intellectual Capital Disclosure***

Dalam menjalankan tugasnya, komite audit paling sedikit mengadakan rapat empat kali dalam satu tahun (*Corporate Governance Guidelines*, 2007 dalam Permatasari, 2010). Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain tercantum dalam *Corporate Governance Guidelines*, dalam *Audit Committee Charter* (2005) dinyatakan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Price Waterhouse (dalam Li *et al.*, 2008) merekomendasikan bahwa komite audit harus mengadakan sedikitnya tiga atau empat pertemuan setiap tahun dan pertemuan khusus ketika diperlukan. Dengan demikian pertemuan komite audit yang lebih sering akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik IC *disclosure*. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Taliyang (2011) menemukan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li *et al.*, (2008) dan Ettredge *et al.*, (2010) bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

### **Metode Penelitian**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *hypotheses testing* yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *corporate governance structure* (proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit) terhadap *intellectual capital disclosure* sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah sektor keuangan yang terdaftar di BEI sebagai populasi karena perusahaan sektor keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pihak luar perusahaan, sehingga memungkinkan data laporan tahunan tersebut di peroleh dalam penelitian ini. Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen - elemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang mewakili populasinya (Sekaran, 2003). Teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang digunakan adalah *purposive*

*sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Hartono, 2004). Adapun kriteria *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah: (1) Perusahaan Sektor keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) antara tahun 2008 sampai dengan 2011 pada *website* Bursa Efek Indonesia (BEI), (3) *Annual report* yang diperoleh tidak dalam kondisi rusak (tidak bisa dibaca dan diolah), (4) *Annual report* memberikan informasi lengkap yang sesuai dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

### **Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Independen**

##### **Proporsi komisaris independen**

Proporsi komisaris independen, diukur dari jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Penggunaan komisaris independen mengacu pada Li *et al.*, (2008) dan Taliyang (2011) sebagai variabel independen dari atribut *corporate governance structure*.

##### **Ukuran komite audit**

Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dari setiap perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Indikator yang digunakan mengacu pada penelitian Ho dan Wong (2002), Agustina (2011) dan Herwanti (2012).

##### **Jumlah rapat komite audit**

Jumlah rapat komite audit diukur dari berapa kali pertemuan komite audit yang diselenggarakan selama satu tahun (Li *et al.*, 2008 dan Taliyang, 2011).

#### **Variabel Dependen**

Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini adalah diukur dengan ada tidaknya *intellectual capital disclosure* didalam *annual report* yang mengacu pada penelitian Sveiby (dalam Guthrie *et al.*, 2004). Item *intellectual capital disclosure* yang digunakan dapat dilihat di Tabel 1. Pengukuran jumlah pengungkapan modal intelektual adalah dengan menggunakan metode *content analysis* yakni dengan membaca dan memberi kode informasi yang terkandung di dalam kerangka *intellectual capital* yang dipilih. Kode diberikan menggunakan model *dichotomous coding* yang tidak mempertimbangkan bobot masing-masing yaitu dengan memberikan skor 1 jika atribut *intellectual capital* diungkapkan dan skor 0 jika atribut *intellectual capital* tidak diungkapkan.

**Tabel 1:** Item *Intellectual Capital Disclosure*

<i>Internal capital</i>	<i>External capital</i>	<i>Employee competence</i>
<b>Intelektual Properti</b>	<i>Merk</i>	<i>Know how</i>
<i>Patents</i>	Konsumen	Pendidikan
<i>Copyrightt</i>	Loyalitas konsumen	Kualifikasi jurusan
<i>Trademarks</i>	Nama perusahaan	<i>Work-related knowledge</i>
<b>Aset infrastruktur</b>	Alur distribusi	<i>Work-related competencies</i>
<b>Filosofi management</b>	Kolaborasi bisnis	<i>Entrepreneurial spirit</i>
<b>Budaya perusahaan</b>	<i>Licensing Agreements</i>	
<b>Proses manajemen</b>	<i>Favourable contracts</i>	
<b>Sistem informasi</b>	<i>Franchise Agreements</i>	
<b>Sistem jaringan</b>		
<b><i>Financial relations</i></b>		

Adapun persamaan regresi untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$$IC\_Disc = \beta_0 = \beta_1 Pro\_Kind + \beta_2 Ukr\_Kom + \beta_3 Fre\_Rkau + \varepsilon_i$$

Dimana:

<b>IC_Disc</b>	: Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>
<b>Pro_Kind</b>	: Proporsi komisaris independen
<b>Ukr_Kom</b>	: Ukuran komite audit
<b>Fre_Rkau</b>	: Frekuensi rapat komite audit
<b>B<sub>0</sub></b>	: <i>constant</i>
<b>B<sub>1</sub>..... β<sub>0</sub>β<sub>4</sub></b>	: koefisien regresi
<b>ε<sub>i</sub></b>	: <i>error</i>

## PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 280 perusahaan sektor keuangan.

**Tabel 2:** Sampel

Keterangan	2008	2009	2010	2011	Jumlah
<b>Perusahaan sektor keuangan</b>	69	69	70	72	280
<b>Data <i>annual report</i> yang tidak lengkap</b>	<b>(34)</b>	<b>(34)</b>	<b>(23)</b>	<b>(25)</b>	<b>(116)</b>
<b>Data <i>annual report</i> yang memenuhi kriteria</b>	35	35	47	47	164
<b><i>Outlier</i></b>					<b>(11)</b>
<b>Sampel total</b>					<b>153</b>

Setelah dilakukan seleksi atas populasi untuk menentukan sampel akhir berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 153 perusahaan sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dapat dilihat di Tabel 2.

**Tabel 3:** Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pro_Kind	153	20.00	100.00	50.9805	15.04610
Ukr_Kom	153	2	7	3.73	1.109
Fre_Rkau	153	2	42	10.24	8.143
IC_Disc	153	34.00	88.00	71.0909	11.95327
Valid N (listwise)	153				

Dari hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa rata-rata perusahaan mengungkapkan item *intellectual capital disclosure* adalah sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan sektor keuangan di Indonesia untuk mengungkapkan informasi mengenai *intellectual capital* sudah baik. Perusahaan yang paling banyak mengungkapkan item *intellectual capital disclosure* adalah Bank Danamon Indonesia (2008) yaitu sebesar 88% dari 26 item. Bank Danamon Indonesia sangat peduli dengan perkembangan perusahaannya. Salah satu cara efektif yang digunakan oleh Bank Danamon Indonesia untuk mengembangkan perusahaannya adalah dengan menambah keberadaan 460 kantor cabang (termasuk satu kantor cabang di luar negeri), 1.247 *mass market* (DSP) dan *mobile teams*, 58 CMM *worksites*, 11 cabang Perbankan Syariah, dan 814 ATM (yang didukung pula oleh 14.000 jaringan ATM bersama) (*Annual Report* 2008; hal 37).

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis *multiple regression*, sebelum analisis *multiple regression*, telah dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. *Goodness of fit* model regresi, secara statistik dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F.

**Tabel 4:** Hasil Analisis Multiple Regression

Variabel	Koefisien	t	Sig	Keputusan H <sub>a</sub>
<b>(Constant)</b>	22.936	5,797	0,000	
Pro_Kind	<b>0,145</b>	<b>3,308</b>	<b>0,001*</b>	<b>Diterima*</b>
Ukr_Kom	<b>1,524</b>	<b>2,552</b>	<b>0,012*</b>	<b>Diterima*</b>
Fre_Rkau	<b>0,229</b>	<b>2,876</b>	<b>0,005*</b>	<b>Diterima*</b>
<b>R Square</b>	0,537			
<b>Adjusted Square</b>	<b>R</b> 0,525			
<b>F</b>	42,982			
<b>Sign.</b>	0,000			

Hasil Analisis *multiple regression* dapat dilihat di Tabel 7. *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) tabel menunjukkan nilai sebesar 0,537 dari nilai ini dapat dilihat bahwa variabel independen yang terdiri atas kombinasi proporsi komisaris independen (Pro\_Kind), ukuran komite audit (Ukr\_Kom) dan jumlah rapat komite audit (Fre\_Rkau) dapat menjelaskan variasi variabel dependen berupa *intellectual*

*capital disclosure* (IC\_Disc) sebesar 53%. Sedangkan sisanya sebesar 47% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. Dari F test didapat nilai F hitung sebesar 42,982 dengan probabilitas 0,000. Probabilitas ternyata jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *intellectual capital disclosure* (IC\_Disc). Variabel proporsi komisaris independen (Pro\_Kind), ukuran komite audit (Ukr\_Kom) dan jumlah rapat komite audit (Fre\_Rkau) memiliki nilai signifikansi (*p-value*) masing-masing dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Koefisien ketiga variabel tersebut bernilai positif, yang berarti semakin besar proporsi komisaris independen (Pro\_Kind) semakin tinggi pula tingkat *intellectual capital disclosure*. Hal tersebut berlaku juga pada variabel ukuran komite audit (Ukr\_Kom) dan jumlah rapat komite audit (Fre\_Rkau).

Konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Li *et al.*, (2008) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Li *et al.*, (2008) menyatakan bahwa komisaris independen berperan penting dalam mekanisme internal yang melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Abeysekera (2008) yang menyatakan bahwa dalam hal keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan yang ada termasuk yang berkaitan dengan *intellectual capital disclosure*. Ukuran komite audit ditunjukkan dengan Ukr\_Kom, berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Koefisien Ukr\_Kom positif memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara ukuran komite audit dengan *intellectual capital disclosure*. Semakin besar ukuran komite audit perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat *intellectual capital disclosure*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Li *et al.*, (2008) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit menjadi penting karena komite audit dapat mempengaruhi praktik *intellectual capital*. Komite audit dapat menjadi suatu mekanisme pengawasan yang memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan dan manajer, terutama dalam lingkungan pelaporan keuangan dimana mempunyai tingkat informasi yang berlainan (Permatasari, 2010).

Frekuensi rapat komite audit ditunjukkan dengan Fre\_Rkau, berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Taliyang (2011) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit berhubungan positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada perusahaan yang terdaftar Malaysia. Hal ini di dukung oleh Li *et al.*, (2008) dimana rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Li *et al.*, (2008) menyatakan bahwa rapat komite audit merupakan salah satu aktivitas penting dalam mengawasi perilaku manajemen dengan memperhatikan *intellectual capital disclosure* untuk mengurangi asimetri informasi.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Tingkat *intellectual capital disclosure* di Indonesia ternyata sudah cukup baik (rerata sebanyak 71% dari total 26 item *intellectual capital disclosure*). Tingginya tingkat *intellectual capital disclosure* menunjukkan penerapan prinsip *corporate governance* telah dilakukan dengan baik oleh perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin besarnya kesadaran perusahaan sektor keuangan di Indonesia akan pentingnya *intellectual capital disclosure* dalam menciptakan dan mempertahankan keuntungan kompetitif dan *shareholder value*. Menurut survei global menunjukkan bahwa *intellectual capital disclosure* merupakan tipe informasi yang banyak di pertimbangkan oleh investor (Bozzolan, *et al.*, 2003).

### Keterbatasan

Hasil koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 53% yang berarti bahwa pengungkapan *intellectual capital* dapat dijelaskan secara signifikan oleh proporsi komisaris independen (Pro\_Kind), ukuran komite audit (Ukr\_Kom) dan jumlah rapat komite audit (Fre\_Rkau). Hal ini memungkinkan bahwa *intellectual capital disclosure* yang masih dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 47%. Penelitian ini menggunakan metode *scoring* dengan bobot yang sama (*unweighted*) pada setiap item yang diungkap dalam *annual report* perusahaan. Jadi tidak ada perbedaan skor untuk perusahaan yang mengungkap item *intellectual capital* secara detail bila dibandingkan dengan perusahaan yang mengungkap tapi tidak secara detail. Adanya subjektivitas dalam mengukur tingkat pengungkapan informasi *intellectual capital* di dalam laporan tahunan. Subjektivitas dapat disebabkan oleh karakteristik data atau internal peneliti sehingga memungkinkan untuk memanipulasi data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, Indraa. 2008. *A Framework to Audit Intellectual Capital*. Working Paper. Faculty of Commerce, University of Wollongong.
- Agustina, Sofia. 2011. *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Voluntary Disclosure*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Terpublikasikan.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System, Edisi 11*, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2, Jakarta.

- Bozzolan, S., Favotto, F. dan Ricceri, F. 2003. Italian Annual Intellectual Capital Disclosure: An Empirical Analysis. *Journal of Intellectual Capital*, vol. 4 (4), pp. 543-558.
- Bukh, P. N. 2005. Commentary: The Relevance of Intellectual Capital Disclosure: A Paradox?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16 (1): 49-56.
- Cerbioni, Fabrizio dan Antonio Parbonetti. 2007. Exploring The Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies. *European Accounting Review*, 16 (4), 791-826.
- CIMA. 2001 *Managing the Intellectual Capital within Today's Knowledge-Based Organization*. Technical Briefing-September.
- Fitriani, Ayu. 2012. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual*. Skripsi Undip Semarang. Tidak Terpublikasikan.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Seri Tata Kelola (Corporate Governance)* Jilid II. <http://fcgi.org.id/>
- Guthrie, James dan Petty, R. 2004. Intellectual Capital: Australian Annual Reporting Practices. *Journal of Intellectual Capital*, vol. 1 (3), pp. 241-251.
- Hartono, Jogyanto. 2004. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Haniffa, R. M. dan Cooke T. E. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24:391- 430.
- Herwanti, Winda. 2010. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Terpublikasi.
- Ho, Simon S.M. dan Wong, Kar Shan. 2001. A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 10: 139-156.
- Li, Jing., Pike, R., dan Haniffa, R. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2):137-159.

- Mohd-Nasir, N dan Abdullah, S.N. 2004. Accrual Management and the roles of boards of directors and audit committees among Malaysian listed companies: Evidence during the Asian financial crisis. *IJUM Journal of Management & Economics*, 12 (1), 49-80.
- Permatasari, Venessa. 2010. Praktik *Intellectual Capital Disclosure* dan Permintaan *Narrow Financial Based Stakeholders di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Terpublikasi.
- Purnomosidhi, Bambang. 2006. Praktik pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Publik di BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, vol. 9 (1), pp. 1-20.
- Rupidara, Neil. 2008. *Modal Intelektual dan Strategi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia*. Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Saleh, Norman Mohd, Rahman, Mara Ridhuan Abdul, dan Hasan. Mohamat Sabri. 2008. Ownership Structure and Intellectual Capital Performance in Malaysian Companies Listed in MESDAQ. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Sawarjuwono, Tjiptohadi dan Agustine Prihatin Kadir. 2003. Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 5 (1), pp. 35 – 57.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Third Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Taliyang, S.M. 2011. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, vol.6, No.12.